

Menko Zulkifli Hasan Paparkan Program MGB di Hadapan Para Siswa Menuju Indonesia Emas 2045

Category: News
26 Januari 2026



Menko Zulkifli Hasan Paparkan Program MGB di Hadapan Para Siswa Menuju Indonesia Emas 2045

KAB BANDUNG, Prolite – Dalam kunjungan kerja Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memaparkan keunggulan program unggulan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) di hadapan para siswa SMA dan SMK di Kabupaten Bandung.

Menurutnya, program MBG tersebut diantaranya bertujuan untuk membangun generasi sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia Emas 2045 dengan pemenuhan asupan makanan bergizi.

“Anak-anak Indonesia mesti pintar, mesti sehat. Enggak boleh kalah sama anak-anak Tiongkok, Korea, Singapura dan juga anak-anak Barat. Kuncinya yaitu ada di asupan makanan,” ujar Zulhas

pada kegiatan bertema Menko Pangan 'Goes to School' itu.

Zulhas didampingi Bupati Bandung Dadang Supriatna (Kang DS) dan pejabat lainnya, menyebut 20 tahun lalu, fisik dan kecerdasan orang Indonesia sama hebatnya dengan orang Jepang, Korea, Tiongkok hingga Singapura. Namun, saat ini Indonesia tertinggal karena mereka menginvestasikan banyak anggaran untuk memberi asupan makanan bergizi bagi rakyatnya.

"Kita lihat Singapura. Mereka enggak punya sumber daya alam seperti kita. Tapi mereka negara kaya. Kenapa? Karena orangnya pinter-pinter dan sehat. Kenapa pinter dan sehat? Karena makanannya bagus. Gizinya seimbang. Jadi asupan makanan bergizi ini penting. Pak Presiden Prabowo tahu permasalahan, dan tahu solusi. Makanya kebijakan Pak Presiden yaitu Makan Bergizi Gratis," tambah Zulhas.

Menko Pangan juga berpesan kepada para siswa Kabupaten Bandung agar mereka bersungguh-sungguh dalam belajar dan meraih cita-cita. Terlebih, saat ini para siswa dapat menikmati berbagai kemudahan dan fasilitas memadai dalam mengenyam pendidikan termasuk dukungan MBG.

"Dulu saya sekolah jalan kaki 5 kilometer. Terus belum ada listrik. Sekolah juga bocor. Tapi alhamdulillah saya bisa jadi Menko. Pernah jadi Ketua MPR. Nah kalian juga bisa jadi apapun yang diinginkan asal bersungguh-sungguh dan berani. Kesuksesan ditentukan oleh kalian sendiri," tegas Zulkifli Hasan.

Ia menegaskan melalui program unggulan Makan Bergizi Gratis ini, Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar anak-anak Indonesia memiliki fisik yang sehat dan kuat serta kecerdasan seperti negara-negara maju sebagai investasi menuju Indonesia Emas 2045.

Empat sekolah yang dikunjungi Zulhas yakni Madrasah Aliyah (MA) Al Mukhlis di Kecamatan Cangkuang, dan tiga sekolah di Kecamatan Soreang yakni SMK Negeri 1 Soreang, SMA Negeri 1 Soreang dan SMK Merdeka Soreang.

Satgas MBG akan Dibentuk Pemkot Bandung untuk Meningkatkan Mutu

Category: News
26 Januari 2026



Satgas MBG akan Dibentuk Pemkot Bandung untuk Meningkatkan Mutu

Prolite – Korban keracunan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia salah satunya di Jawa Barat menjadi yang tertinggi hingga saat ini.

Oleh karena itu Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkomitmen meningkatkan mutu tata Kelola dan pelayanan MBG.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan menggandeng para ahli gizi, mitra, serta Satuan Pelayanan Pangan dan Gizi (SPPG).

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin usai menghadiri Rapat Konsolidasi Regional Jawa Barat dalam rangka peningkatan tata kelola MBG yang digelar oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Sentul, Bogor, pada Senin 13 Oktober 2025 kemarin.



Wakil Wali Kota Bandung, Erwin

“Kita semua harus menjaga agar tidak ada lagi kasus keracunan pada siswa-siswi. Distribusi makanan harus terkelola dengan baik, dan kualitasnya harus terus dijaga,” ujar Erwin.

Erwin mengatakan, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) MBG di setiap kota dan kabupaten sebagai langkah nyata untuk memperkuat pengawasan di lapangan.

“Semua daerah harus membentuk Satgas MBG, ini akan kita upayakan. Jangan sampai ada kasus keracunan lagi. Tingkatkan kualitas makanan dan pastikan distribusi menu gizi seimbang berjalan dengan baik. Saya yakin semua harus jalan bersama-sama,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Bandung berencana mendorong penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis.

Langkah ini diharapkan dapat memastikan keamanan dan mutu makanan yang dikonsumsi anak-anak sekolah.

Kegiatan konsolidasi regional tersebut menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan Kepala SPPG, ahli gizi, mitra, serta pemerintah daerah untuk membangun pemahaman bersama dalam peningkatan mutu tata kelola program MBG.

Rapat di Sentul tersebut merupakan seri ketiga dari rangkaian konsolidasi regional setelah sebelumnya dilaksanakan di Semarang (wilayah Jawa Tengah dan DIY) serta di Surabaya (wilayah Jawa Timur).

Cegah Keracunan, Dinkes dan DKPP Intens Periksa MBG

Category: Daerah
26 Januari 2026



BANDUNG, Prolitenews – Kepala Dinas Pendidikan Asep Gupron membenarkan saat ini pengawasan makan bergizi gratis (MBG) cukup ketat dan intens dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).

Di kota Bandung ada 87 dan sedang berproses 3 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Nah sekarang Dinkes intens melakukan pendampingan terhadap beberapa SPPG. Kita ada 87 dan 3 berproses jadi ada 90, sebagian besar belum mendapat SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi). Makanya pak wali meminta Dinkes dan DKPP melakukan pendamping layak atau tidak SPPG tersebut,” ujar Asep di Balai Kota, Selasa (14/10/2025).

Kota Bandung sendiri kata Asep baru menyediakan MBG sekitar (62,58%) atau hampir peserta didik dari jumlah peserta didik terdata di dapodik Disdik dan Kemenag sebanyak tingkat TK, SD, MI, MTs, SMK.

“Semua dapat SMA 3 pun dapat, yang menentukan sekolah dapat enggak itu BGN bukan ranah kami. Pokoknya kami mengawas TK, SD, SMP, Madrasah Ibtidaiyah, Aliyah, Tsanawiyah. SMA sama tapi bukan dibawah kita. Semuanya ada 87 lokasi termasuk SMA per zonasi,” ujarnya.

Sekarang setiap sekolah wajib membentuk pengawas. Dimana tugasnya mengecek makanan sebelum dikasih ke peserta didik.

“Dilihat dulu berlendir gak, lalu dicium berbau gak. Kalau tidak layak sekolah tidak menentukan tapi koordinasi dulu dengan Dinkes dan DKPP setelah dicek kedua OPD tersebut kalau tidak layak buat berita acara,” tegasnya.

Dedi Mulyadi Usulkan MBG Diberhentikan Sementara, Usai 1500 Lebih Siswa di Jawa

Barat Jadi Korban

Category: News

26 Januari 2026



Dedi Mulyadi Usulkan MBG Diberhentikan Sementara, Usai 1500 Lebih Siswa di Jawa Barat Jadi Korban

Prolite – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berhentikan untuk sementara di Jawa Barat.

Usulan tersebut bukan tana sebab, Gubernur Jabar melihat banyaknya korban siswa yang keracunan usai menyantap MBG yang dibagi melalui sekolah tersebut.

Kaena banyaknya korban makan Dedi Mulyadi meminta untuk diberhentikan sementara untuk bisa dilakukan evaluasi.

Usulan itu ia sampaikan se usai rapat evaluasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Bogor, Senin (29/9/2025).

“Evaluasinya satu dihentikan sementara, yang kedua ada langkah-langkah teknik dan administratif yang segera

ditempuh,” kata Dedi kepada wartawan.

Kita semua tau bahwa korban dari MBG di beberapa daerah di Jawa Barat sudah banyak seperti yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Garut sebanyak 299 siswa, Kabupaten Bandung Barat sebanyak siswa dan yang terahir di SMPN 3 Banjar sebanyak 68 siswa.

Menurut Gubernur Jawa Barat perlu diberhentikan sementara agar pemerintah daerah memiliki cukup ruang untuk meninjau kembali program yang di berikan pemerintah untuk para pelajar.

Peninjauan akan dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat untuk mekanisme program mulai dari aspek distribusi, pengawasan dapur, hingga standar bahan pangan yang digunakan.

Ia menegaskan bahwa evaluasi ini bertujuan memastikan keamanan makanan yang disajikan kepada siswa sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap program prioritas nasional tersebut.

Meski demikian, Dedi mengakui bahwa keputusan akhir berada di tangan pemerintah pusat.

Ia masih menunggu diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) yang dikabarkan tengah digodok sebagai payung hukum baru bagi pelaksanaan MBG.

“Kami menunggu keputusan pusat, karena program ini inisiatif nasional. Tapi untuk Jawa Barat, saya kira kita perlu jeda untuk membenahi hal-hal teknis,” ujarnya.

Selain itu, Dedi juga menyiapkan pembentukan tim evaluasi khusus di tingkat provinsi.

Tim ini nantinya akan merumuskan sejumlah perbaikan, termasuk usulan agar guru tidak lagi mencicipi makanan sebelum disajikan kepada siswa.

Tugas itu, menurut Dedi, sebaiknya dilakukan oleh tim

pemeriksa khusus yang memiliki kompetensi teknis.

310 Siswa Keracunan MBG, Polda Jawa Barat Terus Kawal Insiden Hingga Tuntas

Category: News
26 Januari 2026



310 Siswa Keracunan MBG, Polda Jawa Barat Terus Kawal Insiden Hingga Tuntas

Prolite – Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan pemerintah untuk seluruh siswa di Indonesia kembali terjadi.

Kali ini keracunan menimpa ratusan siswa dari berbagai jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Seluruh siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan usai

mengonsumsi makanan MBG yang di bagi.

Hingga Senin (22/9), pukul WIB, jumlah korban sementara tercatat sebanyak 301 orang. Para korban merupakan siswa dari berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

“Kami sangat khawatir dengan kondisi anak-anak kami. Semoga mereka segera pulih,” ujar salah seorang orang tua siswa yang anaknya menjadi korban keracunan.



Sekitar Bandung

Penanganan darurat dilakukan di sejumlah fasilitas kesehatan yang tersebar di wilayah Kecamatan Cipongkor dan sekitarnya. Sebanyak 116 orang dirawat di Puskesmas Cipongkor, 13 orang mendapatkan penanganan medis di Bidan Desa Sirnagalih, 27 orang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cililin, 127 orang mendapatkan pertolongan pertama di Posko Kecamatan Cipongkor, dan 18 orang lainnya dirawat di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Anugrah.

Hingga saat ini, korban masih terus berdatangan ke Posko Kecamatan Cipongkor, sehingga jumlah korban diperkirakan masih akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rochmawan, ., M.H, membenarkan adanya peristiwa keracunan massal yang diduga dari menu MBG yang di konsumsinya tersebut.

“Benar, hingga malam ini jumlah korban sementara sudah mencapai 301 orang. Kami masih terus melakukan pendataan karena korban terus berdatangan. Penanganan medis sudah disiapkan di beberapa titik, termasuk di puskesmas, rumah sakit, dan posko darurat. Polda Jabar bersama instansi terkait akan terus memantau dan memastikan seluruh korban mendapatkan

perawatan yang optimal,” ujarnya pada Selasa (23/9).

Kombes Pol Hendra menambahkan, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, untuk menelusuri sumber makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan massal ini. Penyelidikan akan dilakukan secara menyeluruh dan mendalam untuk mengungkap penyebab pasti keracunan apakah dari menu MBG yang disantap atau dari makanan yang lain.

“Kami imbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik. Saat ini tim kesehatan fokus pada penanganan korban, sementara aparat Kepolisian akan membantu memastikan penyelidikan terkait penyebab dugaan keracunan ini berjalan lancar dan transparan,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban masih berpotensi bertambah seiring dengan adanya laporan terbaru dari lapangan. Pihak kepolisian dan instansi terkait terus berupaya untuk memberikan penanganan terbaik kepada para korban dan mengungkap penyebab pasti dari keracunan massal ini.

Usai 657 Siswa Keracunan, Dapur MBG Ditutup Sementara untuk Penyelidikan

Category: News
26 Januari 2026



Usai 657 Siswa Keracunan, Dapur MBG Ditutup Sementara untuk Penyelidikan

Prolite – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah terlaksana di beberapa sekolah di Indonesia.

Namun dalam pelaksanaannya tersebut banyak juga terjadi masalah salah satunya keracunan.

Baru-baru ini terjadi keracunan MBG di Jawa Barat tepatnya di Garut sebanyak 657 siswa diduga keracunan usai santap menu Makan Bergizi Gratis yang dibagikan.

Usai kejadian yang mengakibatkan ratusan siswa harus mendapatkan perawatan dapur penyedia menu MBG di tutup sementara.

“Ya, di-pending itu kan berarti ditutup sementara,” kata Bupati Garut Jawa Barat Abdusy Syakur Amin, kepada wartawan di Garut, dikutip dari Antara, Senin (22/9).



TribunJabar

Ia mengatakan kewenangan program MBG tersebut sepenuhnya ada di Badan Gizi Nasional (BGN). Sedangkan daerah merupakan penerima manfaat dari program tersebut.

Dengan adanya insiden itu, kata dia, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Kadungora, yang sajiannya dikonsumsi siswa tersebut, untuk sementara tidak beroperasi dulu sambil menunggu hasil uji laboratorium.

“Itu kan ranahnya BGN, jadi semua mulai dari izin pendirian, kemudian juga pengawasan, itu sampai saat ini masih dikontrol oleh BGN,” katanya.

Begitu juga tim Dinkes Garut, kata dia, sudah melakukan uji sampel makanan yang disajikan dalam menu MBG tersebut untuk mengetahui penyebab keracunannya. Juga belum bisa diduga-duga faktor penyebabnya.

Kita semua tau bahwa program tambahan makan bergizi ini dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat khususnya anak-anak di sekolah.

Namun karena banyaknya korban yang diduga mengalami keracunan aka dari itu dapur penyedia menu untuk anak sekolah ditutup, hingga menemukan apa penyebabnya.

Sebelumnya Dinkes Garut sudah mengambil sampel makanan untuk diuji laboratorium dan sudah menangani siswa yang mengalami gejala keracunan. Dari 657 orang, 19 di antaranya dirawat dan sudah pulih.

Kejadian itu berawal dari sejumlah siswa mengeluh sakit, seperti pusing, mual, dan muntah-muntah, setelah menyantap makanan yang disajikan di sekolahnya, yakni MA Maarif Cilageni, SMA Siti Aisyah, dan SMP Siti Aisyah, kemudian SDN 2 Mandalasari di Kecamatan Kadungora pada Selasa (16/9).

MBG, Ledia Beri 4 Catatan Dari Efisiensi Jumlah Hingga Pengelolaan Sampah

Category: Politik & Parlemen
26 Januari 2026



MBG, Ledia Beri 4 Catatan Dari Efisiensi Jumlah Hingga Pengelolaan Sampah

Prolite – Di masa reses, anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa sekolah di Kota Bandung dan Kota Cimahi. Hasil kunjungan dan serap aspirasi tersebut dirangkum Ledia dalam empat catatan.

Pertama, dari hasil kunjungan ke beberapa sekolah ini terungkap bahwa kebutuhan akan program MBG ini tidak merata keseluruhannya.

Ada sejumlah sekolah yang memang kondisi sebagian besar siswanya dari kalangan tidak mampu atau hampir semuanya tidak mampu. Yang memang kalau pagi-pagi mereka sulit untuk sarapan, tidak punya bekal, dan lain sebagainya. Maka sekolah ini tentu menjadi prioritas utama. Sementara ada sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu sehingga tidak begitu memerlukan program MBG.

“Mengingat pelaksanaan program ini membutuhkan dana sangat besar dan saat ini bahkan belum bisa menjangkau semua sekolah di seluruh Indonesia, maka diperlukan pendataan yang lebih jelas agar diperoleh informasi akurat mana-mana sekolah yang harus diprioritaskan menerima program MBG ini,” kata anggota Komisi X DPR RI ini.

Kedua, perlu efisiensi jumlah paket makanan, dengan tidak menyamaratakan jumlah paket makanan setiap hari. Sebab setiap sekolah umumnya sudah punya ukuran rata-rata berapa yang tidak hadir di sekolah dalam satu hari. Misalnya pada salah satu SMP yang dikunjungi, rata-rata ada 60 siswa dari 800 siswa tidak hadir setiap harinya. Namun selalu dikirim 800 paket makanan sesuai jumlah siswa sehingga ada kelebihan puluhan paket makanan setiap hari.

“Kalau sudah punya ukuran rata-rata ini, mungkin tidak harus dikirim 800 paket makanannya, bisa saja 750 cukup. Agar apa? Agar kita bisa melakukan efisiensi dan mencegah pemborosan. Efisiensi anggaran bisa terbukti dari sini. Bukan menyatakan efisiensi tetapi dengan cara dikurangi mutu atau kualitas produknya,” saran aleg dapil Jawa Barat 1 ini pula.

Urusan kelebihan makanan ini bukan perkara remeh. Sebab kelebihan hingga puluhan paket makanan setiap hari tentu memiliki dampak anggaran yang cukup besar dalam hitungan

bulan, semester hingga tahun.

“Karena di sini kita bicara program yang dibiayai oleh APBN, oleh dana dari pajak masyarakat juga, maka kasus kelebihan pengiriman makanan hingga berjumlah bukan sekedar satu dua tapi puluhan dan terjadi setiap hari tentu bertolak belakang dari semangat efisiensi,” lugasnya.

Sebenarnya, lanjut Ledia, upaya meminimalisir kelebihan pengiriman ini memungkinkan terjadi kalau antara pihak sekolah dan dapur MBG bisa melakukan koordinasi.

“Makanan itu kan diantar siang ya, diolah sejak pagi. Bagi yang dapurnya cukup dekat, masih dalam kisaran satu kecamatan misalnya, sekitar jam pagi kan sudah bisa dilaporkan, berapa siswa yang tidak hadir. Dari 800 siswa, yang tidak hadir 60 orang. Maka bisa dikirim 750 paket saja, masih ada lebih tapi tidak banyak. Masih memadailah gitu. Cuma orang suka berpikir ah repot, ribet kalau ada ganti-ganti jumlah tiap hari. Padahal lama-lama akan ketemu polanya, dan bisa diminimalisir kelebihan paket tidak lebih dari 10 misalnya. Pihak dapur yang terbiasa memegang beberapa sekolah tentu bisa mengatur hal ini.”

Ketiga, terkait dengan sampah sisa makananan. Tanpa menghitung kelebihan makanan saja, paket MBG ini setiap hari menyisakan sampah, seperti kulit buah, kotak bekas susu, serta sisa makanan yang tidak habis dimakan siswa. Satu dua hari masih aman, namun setelah berbilang pekan dan bulan beberapa sekolah mulai memiliki problem baru; pengelolaan sampah.

Aanggota Komisi X DPR RI sekaligus Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini lantas menceritakan curhat kepusingan sekolah soal cara pengelolaan sampah.

“Sampah diproduksi setiap hari padahal tidak semua wilayah punya sistem pengelolaan sampah yang baik dan cepat. Beberapa sekolah jadi curhat terkait PR baru soal pengelolaan sampah ini. Sekolah pada akhirnya memerlukan bantuan dalam hal

pengelolaan sampah. Entah akan dimagotisasi, dikomposting, mau diapain juga itu sampah tentu harus disiapkan agar tidak menumpuk dan menjadi sumber masalah baru. Artinya, perlu koordinasi juga antara sekolah dan pihak terkait seperti RW dan Kelurahan.”

Terakhir, dari hasil pengamatan ini, perjalanan kunjungan kerja dan juga beberapa laporan yang masuk pada Komisi X DPR RI terungkap bahwa kebutuhan prioritas utama program MBG ini lebih nyata diperlukan pada daerah-daerah 3T.

“Daerah 3T, daerah tertinggal, terdepan, terluar, itu sungguh sangat perlu diafirmasi agar percepatan ketercapaian gizi sehari-harinya itu bisa memadai. Angka kurang gizi, stunting, itu banyak ditemukan pada daerah 3T.”

Karena itu Ledia mengingatkan Pemerintah agar menempatkan prioritas program MBG ini utamanya pada daerah 3T disusul pada daerah lain dengan prioritas pemberian program bagi sekolah yang memiliki mayoritas siswa dari golongan masyarakat menengah ke bawah.

“Ini tentu memerlukan pendataan yang tepat agar program ini bisa benar-benar mendorong peningkatan gizi anak-anak Indonesia masa depan,” tutupnya.

Makan Sehat, Anak Kuat, Warga Berdaya, Bandung Jadi Teladan Program Makan Bergizi Gratis

Category: News
26 Januari 2026



Makan Sehat, Anak Kuat, Warga Berdaya, Bandung Jadi Teladan Program Makan Bergizi Gratis

KOTA BANDUNG, Prolite – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus menunjukkan komitmennya menghadirkan layanan pendidikan, makan sehat dan kesehatan yang berkualitas melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Diluncurkan secara nasional sejak Januari 2025, program ini menjadi salah satu prioritas utama di Kota Bandung. Fokusnya, tidak hanya pada kandungan gizi yang optimal, tetapi juga pada kebersihan, higienitas, dan keamanan pangan yang didistribusikan untuk anak-anak sekolah.

Program makan sehat MBG di Kota Bandung juga mendapat apresiasi langsung dari Pemerintah Pusat. Tenaga Ahli Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati menyampaikan bahwa skema pelaksanaan makan sehat MBG di Bandung menjadi contoh kolaborasi yang baik.

Selain memastikan makanan yang higienis dan aman, program ini

dinilai berdampak ganda karena memberdayakan lebih dari 47 warga binaan untuk mengelola dapur MBG.



dok Provinsi Jawa Barat

“Program MBG di Bandung bukan hanya meningkatkan gizi anak-anak, tapi juga memberdayakan lebih dari 47 warga binaan yang mengelola dapur MBG,” ujar Adita.

Hal ini diungkapkan Adita saat saat berkunjung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamanik yang berlokasi di Lapas Kelas 1 Sukamiskin, serta ke SDN 101 Sukakarya.

Kunjungannya didampingi Tim Badan Gizi Nasional dan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin.

“Ini membuka peluang keterampilan baru bagi mereka setelah masa pembinaan. Skema seperti ini patut menjadi contoh yang bisa diterapkan di tempat lain,” imbuh Adita.

Dalam pelaksanaannya, Pemkot Bandung juga menerapkan pengawasan lintas sektor dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan puskesmas setempat.

Menurut Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, seluruh bahan makanan yang masuk ke dapur MBG dipastikan telah melalui proses pemeriksaan ketat dan uji kelayakan.

“Pengawasan ini kami lakukan secara menyeluruh, dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan di dapur, hingga distribusi ke sekolah. Kami ingin pastikan tidak ada celah yang mengganggu kualitas dan keamanan makanan anak-anak kita,” jelas Erwin.

“Kami pastikan makanan untuk anak-anak bukan hanya bergizi, tapi juga diproses di dapur yang bersih, sehat, dan higienis. Semua dapur MBG telah lolos uji kelayakan dan diawasi ketat, baik dari aspek kebersihan, keamanan, maupun kandungan gizinya,” tutur Erwin.

Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai mitra, Program MBG di Bandung diharapkan terus menjadi model inspiratif yang tidak hanya menyehatkan generasi muda, tapi juga menguatkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.

Lokus SPPG Belum Maksimal, Bupati Bandung: Padahal Masyarakat Antusias

Category: Daerah
26 Januari 2026



Kuota 361 Lokus SPPG, Baru Terealisasi 15 Titik

KAB BANDUNG, Prolite – Bupati Bandung Dadang Supriatna menyayangkan lambannya realisasi penentuan lokus Satuan

Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rangka mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo.

Bupati Bandung juga menyampaikan aspirasinya, agar Badan Gizi Nasional (BGN) segera menentukan SPPG di Kabupaten Bandung yang hingga saat ini realisasinya masih sangat minim.

Aspirasi tersebut bupati sampaikan saat Halal bi Halal bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bandung dan Sosialisasi Program MBG dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung serta Badan Gizi Nasional (BGN), di Gedung Mochammad Toha Soreang, Kamis 24 April 2025.

“Mumpung ada BGN di sini, saya ingin menyampaikan aspirasi. Dari kuota Kabupaten Bandung yang sebanyak 361 titik lokus SPPG, sampai sekarang baru terealisasi 15 titik lokus SPPG. Satu titik lokus SPPG untuk melayani jiwa,” ungkap Bupati Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini.

Padahal, kata Kang DS, masyarakat Kabupaten Bandung menyambut baik, sangat antusias mendukung program MBG ini.

“Jadi, ini aspirasi saya langsung, bisakah BGN mempercepat dengan mempermudah proses penentuan titik lokus SPPG?” tanya dia.



Karena menurutnya semua pihak sudah siap membantu. Pemkab Bandung melalui Dinas Koperasi dan UKM siap bantu pembiayaan dari dana APBD untuk pendirian Koperasi Merah Putih di 280 desa dan kelurahan, termasuk Bank Bjb juga siap membantu.

“Termasuk para pengelola pondok pesantren sudah hampir 60 pesantren juga menyatakan siap untuk menjadi SPPG. Dari PCNU Kabupaten Bandung juga siap membantu berperan aktif, tidak hanya mau jadi penonton,” imbuh Kang DS.

Terlebih program MBG ini merupakan program yang tidak bisa

ditawar-tawar lagi yang harus terealisasi tahun 2025 sampai 2030 karena sudah menjadi fokus Presiden Prabowo akan janji politiknya. Bahkan akhir Desember 2025 ditargetkan sudah bisa diimplementasikan di seluruh Indonesia.

“Kepada BGN, mohon bantuannya untuk segera memutuskan lokus SPPG berdasar aspirasi dari pimpinan pesantren. Jadi, jangan terkesan menghambat atau mempersulit proses penentuan titik lokus SPPG. Kepada Yang Terhormat Anggota Komisi IX DPR RI Bapak Asep Romny Romaya kami juga mohon dorongannya, demi kemajuan bangsa,” ucap Kang DS.

Kepala Dinas KUKM Kabupaten Bandung, Dindin Syahidin mengatakan, Sosialisasi Program MBG dan Pembentukan Koperasi Merah Putih ini akan sangat bermanfaat bagi peserta sosialisasi dari seluruh pengurus NU Kabupaten Bandung, mulai dari tingkat ranting PARNU dan PRNU, termasuk MWC sampai PCNU.

“Kami mensosialisasikan konsep pendirian Koperasi Merah Putih, sesuai dengan Inpres Nomor 9 tahun 2025 yang koperasinya didesain untuk mensukseskan program MBG,” jelas Dindin.

Tekait aspirasi Bupati Bandung, Dindin mengakui karena memang Kabupaten Bandung sendiri sudah melakukan beberapa langkah cepat terkait dengan Inpres.

“Pak Bupati sangat cepat merespon Inpres ini dengan menggratiskan biaya pendirian Koperasi di 280 desa dan kelurahan,” ujar Dindin.

Pihaknya menargetkan, sebelum peringatan Hari Koperasi 12 Juli 2025, sudah terbentuk semua KMP di 280 desa/kelurahan.

“Secara bertahap sesuai arahan pa bupati di beberapa desa yang sudah terbentuk KMP, akan kita dorong untuk percepatan untuk segera djadikan SPPG,” pungkas Dindin.